

Indonesia dan Gerakan Separatisme: Mengapa bisa terjadi?

Rivo Juicer Wowor

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menganut sistem republik presidensial. Tapi selama Indonesia berdiri, banyak aksi separatisme yang dilakukan oleh beberapa daerah dan organisasi di Indonesia untuk membuat negara baru terpisah dari Indonesia, contohnya seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Keduanya memiliki alasan yang serupa ketika ditanya mengapa ingin meninggalkan Indonesia, diantaranya adalah dominannya pemimpin dari Jawa yang ada di pemerintahan Indonesia. Mereka menganggap bahwa politik Indonesia yang dikontrol oleh mayoritas Jawa tidak memberikan hak politik dan ekonomi kepada etnis minoritas. (Trajano, 2010). Selain itu ada beberapa alasan khusus juga mengapa masing-masing OPM dan GAM ingin memisahkan diri dari Indonesia. Contohnya, terbentuknya GAM awalnya bermula dari pemerintah Indonesia yang mengeksploitasi gas alam yang ada di Aceh Utara. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pembagian untung yang lebih menguntungkan pemerintah Indonesia ketimbang rakyat Aceh yang mengakibatkan kelaparan yang dialami oleh masyarakat Aceh sendiri (Sari et al., 2019). Lalu ada Organisasi Papua Merdeka, dimana mereka merasa kecewa oleh politik sentralisasi atau Indonesianisasi yang dibuat oleh Presiden Suharto pada masa Orde Baru. Karena program ini melarang pemakaian baju tradisional Papua, serta melarang simbol dan tradisi adat yang ada di Papua, sehingga masyarakat Papua merasa bahwa pemerintah Indonesia ingin menghilangkan budaya Papua itu sendiri (Trajano, 2010).

Lalu bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi aksi separatisme di Indonesia? Beberapa diantaranya memberikan hak-hak yang setara diantara semua masyarakat, etnis, atau daerah. Seperti yang dilakukan di India dengan mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan kepada masing-masing negara bagian untuk menggunakan bahasanya sendiri (Cipto, 2016). Selain itu, juga memberikan keadilan bagi rakyat minoritas untuk dapat duduk di kursi pemerintahan seperti DPR dalam jumlah yang setara dengan rakyat mayoritas. Sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat menguntungkan rakyat mayoritas maupun minoritas.

Daftar Pustaka

- Cipto, B. (2016). Gerakan Separatis dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Demokrasi. *UNISIA*, 0(47). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss47.art2>
- Sari, C. M. A., Hasan, E., & Syahbandir, M. (2019). The Internalisation Process and Pattern on Ideology Ethnonationalism from Five Leaders of the Free Aceh Movement to Their Children. *International Journal of Innovation*, 7(8), 16.
- Trajano, J. C. I. (2010). Ethnic Nationalism and Separatism in West Papua, Indonesia. *Conflict and Development*, 16, 24.